

## **BAB III**

### **ANALISIS HASIL EVALUASI**

Bab III ini akan menjelaskan terkait uraian dan analisa hasil penelitian tentang evaluasi pengelolaan BUMDes Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan indikator yaitu evaluasi pengelolaan badan usaha milik Desa atau BUMDes.

Sebagaimana dijelaskan dalam definisi operasional, penelitian ini menggunakan teori Suharto dalam Apriliana (2016: 10-14) menjelaskan bahwa jenis-jenis evaluasi dapat dilihat melalui beberapa tahapan, secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: Evaluasi Tahap Perencanaan, Evaluasi Pada Tahap Pelaksanaan dan valuasi Pada Tahap Pasca Pelaksanaan.

#### **1. Evaluasi Tahap Perencanaan**

Evaluasi pada tahap perencanaan menurut Soeharto dalam Apriliana (2016: 10) digunakan untuk memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini diawali dengan bagaimann tujuan program dari sebuah proram yang menjelaskan terakait harapan dari hasil akhir program.

##### **a. Tujuan Program BUMDes**

Tujuan pembentukan sebuah program menjadi tolak ukur keberhasilan program. Tujuan program menjadi acuan atau arah seperti apa sebuah program dibawa kedepannya. tujuan program memberikan

dampak terhadap sebuah perencanaan dan pelaksanaan sehingga dapat terarah.

BUMDes Hanyukupi didirikan pada bulan Desember tahun 2010 bertepatan dengan akan diadakannya lomba Desa dimana setiap Desa diharuskan mandiri dan harus bisa masuk ke tahap Desa swasembada atau mengelola sendiri sumberdaya sehingga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan desa. dalam artian desa diwajibkan mengelola dan memanfaatkan sumberdaya untuk selanjutnya kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan awal berdirinya BUMDes Hanyukupi menurut direktur BUMDes Hanyukupi Anang Sutrisno yaitu mewadahi setiap unit usaha yang ada di Desa Ponjong dan mendapatkan keuntungan untuk selanjutnya menjadi serapan pendapatan asli Desa atau PADes.

1) Hasil Akhir Pembangunan Program,

Kemudian BUMDes Hanyukupi Ponjong berlandaskan pada amanat Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 87 menjelaskan dimana BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa Ponjong untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pada perencanaan program BUMDes, Pemerintah Desa Ponjong mempunyai beberapa hasil akhir pada pengelolaan BUMDes.

Terbagi pada tiga sektor yaitu sektor sumber daya, sektor pengelolaan dan sektor pemanfaatan.

Pada sektor sumber daya Desa, BUMDes dituntut dapat membuat badan usaha yang diharapkan menjadi rumah usaha yang di kelola Desa kemudian BUMDes dapat menghimpun usaha Desa yang ada didesa sehingga usaha usaha Desa dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan segala potensi Desa. Kemudian pada sektor pengelolaannya, BUMDes dibentuk memiliki struktur kepengurusan yang berbeda atau terpisah dengan Desa dimana secara struktural, pengurus BUMDes merupakan orang-orang diluar perangkat Desa. pengelola BUMDes merupakan orang-orang hasil rekrutmen berdasarkan kualifikasi ketentuan kebutuhan kerja. kemudian secara pengelolaan keuangan BUMDes diberikan otonomi seluas luasnya dalam mengurus setiap unit usaha. BUMDes diberikan kebebasan untuk mengelola keuangan sesuai kebutuhan.

Pada sektor pemanfaatan hasil akhir BUMDes bisa memberi kemakmuran bagi msasyarakat, pemberdayaan masyarakat dan bisa menambah pendapatan untuk Desa. pemanfaatan hasil usaha BUMDes sendiri dikembalikan kepada mayarakat melauai program 30% CSR atau *corporate sosial responsibility*.

## 2) Tujuan Perencanaan BUMDes

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 bahwa pendirian BUMDesa bertujuan untuk:

- a) meningkatkan perekonomian desa;
- b) mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f) membuka lapangan kerja;
- g) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h) meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

kemudian menurut Direktur utama BUMDes Hanyukupi Anang Sutrinso dalam wawancaranya BUMDes Hanyukupi pada awal dibentuk memiliki tujuan yaitu :

“Rencana kedepan unit usaha dapat berkembang, berjalan dengan baik, tidak rugi, menghasilkan profit, sehingga masyarakat bisa berkecimpung disitu” (wawancara 26 Februari 2018)

Sedangkan dalam peraturan Desa Ponjong Nomor 6 Tahun 2010 tentang pembentukan badan usaha milik Desa pasal 5 menyatakan tujuan pembentukan BUMDes yaitu :

- a) mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa
- b) meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
- c) Meningkatkan berkembang usaha mikro sektor informal dan
- d) Meningkatkan pendapatan asli desa.

#### **b. Kegiatan Pendukung Program**

Pada tahun 2017 Desa Ponjong mendapat alokasi dana Desa sebesar Rp 852.255.200 dimana 30% dana Desa dialokasikan untuk penambahan modal badan usaha milik Desa. kegiatan penunjang program BUMDes tersusun dalam beberapa keegiatan yang telah disusun dalam program kerja BUMDes Hanyukupi 2017, pertama kegiatan sumber daya manusia, kedua kegiatan saran prasarana ketiga bagian program.

Kegiatan sumber daya manusia meliputi kegiatan pelatihan pengelolaan tempat wisata, pembukuan laporan guna menunjang tertib

administrasi, koordinasi rutin sebagai sarana komunikasi dan evaluasi dan asuransi kesehatan BPJS untuk pengurus pengelola.

Kegiatan sarana prasarana atau dalam hal ini adalah pemeliharaan dan pembuatan fasilitas dalam pengelolaan BUMDes yaitu *finishing* pembuatan jembatan penyebrangan, pengecatan slide kolam, reparasi kolam dan sekitarnya dan pembentukan unit usaha baru.

Kegiatan program yaitu event pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisata, program CSR atau *Corporate social responsibility* dalam rangka penyaluran bantuan, sosialisasi water byur, laporan pertanggungjawaban dan evaluasi pengelola Waterbyur dan kuliner.

Kegiatan pendukung Program BUMDes tahun 2017 tersusun dalam

Tabel 3.1 Program kerja BUMDes Hanyukupi tahun 2017

No	Nama Program	Tujuan	Kegiatan	Anggaran	Sumber
1	Finishing Jembatan penyebrangna	1. Penghubung antara parkir, kuliner dan Waterbyur 2. Peningkatan pendapatan	Finishing pembuatan jembatan	10.000.000	SHU BUMDES
2	Pengecatan Slide Kolam	Pengecatan slide permainan anak	Pengecatan permainan anak	3.500.000	BUMDES
3	Reparasi Kolam dan sekitarnya	Kolam terawat dengan baik	Perawatan kolam, perbaikan kursi tunggu dan penjagaan kebersihan	30.000.000	BUMDES
4	Pelatihan pengelolaan tempat wisata	Menguatkan kapiasitas pengelolaan objek wisata	Pelatihan pengeloaan objek wisata	4.600.000	BUMDES
5	Event pariwisata	Menaikan kunjungan wisata	Festivl kesenian budaya kuliner ramadhan	5.000.000	BUMDES, OP
6	Pembukuan laporan	Tertib administrasi	Pembuatan laporan keuangan	500.000	BUMDES

			setiap hai		
7	Kordinasi rutin	Saran komunikasi evaluasi	Rapat internal BUMDes dan OP	1.200.000	BUMDES
8	Program CSR	Membantu anak yang kurang mampu	Beasiswa warag kurang mampu	2,5% keuntungan	BUMDES
9	Sosialisasi Waterbyur	1. Mengenalkan WB dengan promo undian 2. Membuat member card	Pembuatan kartu member, leaflet, dan pamflet, sosmed	1.500.000	BUMDES
10	LPJ BUMDES	Melaporkan hasil kinerja dan keuangan	Laporan pertanggungjaban	5.000.000	BUMDES
11	Evalusai pengelolaan WB dan kuliner	1. Melakukan rolling jabatan 2. Rekrutmen pengelola	Roling dan rekrutmen	1.000.000	BUMDES
12	Pembentukan unit baru	1. Pembentukan unit kicau mania 2. Pembentukan unit tpst 3. Pembentukan unit mobil	Rekrutmen pengelola	1.000.000	BUMDES
13	Asuransi kesehatan BPJS pengurus dan pengelola	1. Jaminan kesehatan 2. Meningkatkan kesejahteraan	BPJS Kesehatan	18.720.000	BUMDES

Sumber :LPJ BUMDes 2017

Hasil program kerja BUMDes Hanyukupi tahun 2017 diatas hampir 90% program sudah terlaksana seperti pembuatan jembatan penghubung antara parkir kuliner dan Waterbyur, kemudian pembentukan unit usaha baru yaitu kicau mania atau gantangan dan pembentukan unit usaha mobil, kemudian pelaporan hasil kinerja keuangan melalui laporan pertanggungjawaban dari data diatas dapat dilihat bahwa hasil program kerja ini sudah sesuai dengan program kerja bahwasanya sudah dilakukan dengan baik.

Tidak hanya itu pada pertengahan 2017 BUMDes Hanyukupi melau

pemerintah Desa Ponjong yang bekerja sama dengan yayasan Penabulu menjalin kerjasama dengan Saemaul Global Foundation, Korea Selatan melalui kerjasama ini terbentuklah program Seamaul Undong atau dalam bahasa Indonesia adalah Desa masa depan.

Program ini menghasilkan 2 unit usaha baru yaitu gedung serbaguna dan peternakan sapi. Program ini menurut perwakilan Seamaul Foundation dalam wawancaranya

“ program Saemaul Undong ini adalah hasil kerjasama yang kedepannya diharapkan Desa Ponjong menjadi Desa berkemajuan dan juga sebagai Desa percontohan kemudian kami dari Korea bisa menjadikan Ponjong sebagai lab kami” (wawancara 27 Februari 2018)

Kemudian menurut Anang Sutrisno dalam wawancaranya menjelaskan

“adanya program kerjasama Saemaul Undong ini memberikan dampak sangat besar untuk BUMDes Hanyukupi ini. Tanpa dana dari luar BUMDes tidak akan bisa maju. Berapa tahun buat kami maju kalo dana sendiri” (wawancara 27 Februari 2018)

Berdasarkan hasil di atas bahwa dengan adanya program kerja pendukung BUMDes dan kerjasama dengan pihak luar. Memberikan hasil kepada BUMDes bahwa pembangunan BUMDes tidak hanya begitu saja berdiri butuh waktu, tenaga dan usaha. Sehingga BUMDes Hanyukupi dapat semakin maju dan berkembang.

## **2. Evaluasi Tahap Pelaksanaan**

### **a. Efisiensi, efektif dan konsisten**

Guna mengoptimalkan dan mengoptimalkan pembangunan BUMDes

Kementerian Desa (2016: 1) membuat kebijakan terkait ke efektifitas dan

efisiensi pembangunan BUMDes yaitu Desa perlu mendorong *stakeholder* pembangunan yakni Pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah berperan memberikan pelayanan publik, mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan dan memberikan peluang kepada swasta dan masyarakat

Kemudian swasta berperan memberikan pelayanan privat sebagai pelaku utama dalam pengembangan usaha, pertumbuhan ekonomi wilayah dan penciptaan lapangan kerja dan terakhir adalah masyarakat sebagai pemeran utama dalam proses pembangunan, namun perlu pengembangan dan penguatan kelembagaan

#### 1) Efisien

Pengelolaan BUMDes Hanyukupi mengedepankan efisiensi baik itu secara waktu, biaya dan tenaga. Sehingga BUMDes Hanyukupi mampu dikelola dengan tepat, cermat, berdaya guna dan bertepatan guna. Hal ini dibuktikan pengelola BUMDes Ponjong dengan memanfaatkan potensi air di Sumber Ponjong menjadi kolam wisata atau dalam hal ini menjadi kolam renang Waterbyur.

Kemudian dari segi pengelola. Pada tahun 2012 berjumlah 10 orang pengelola untuk mengelola satu unit usaha. Tetapi, pada tahun 2017 dengan jumlah tiga unit usaha BUMDes Ponjong hanya menambah 9 orang pengelola sehingga pada tahun 2017 pengelola BUMDes menjadi 19 orang. Hal ini dinilai sangat efisien dalam memanfaatkan jumlah pendapatan BUMDes yang masih kecil.

Selain itu BUMDes Hanyukupi juga menghimpun unit usaha masyarakat dengan menyediakan lahan untuk masyarakat berjualan barang dagangannya seperti warung makan, penjula air, penjual bakso, angkringan dan warung kecil lainnya. Hal ini dirasa sangat bermanfaat dalam memberikan pelayanan untuk pengunjung BUMDes Hanyukupi. Berikut data usaha yang ada disekitar unit usaha Waterbyur Bumdes Hanyukupi Desa Ponjong.

Tabel 3.2 Daftar Usaha Disekitar Bumdes Hanyukupi

NO	Jenis Usaha	Jumlah
1	Usaha warung sembako	2
2	Usaha warung Angkringan	1
3	Usaha mainan anak	2
4	Usaha makanan jajanan	4
5	Usaha minuman dan es cream	2
6	Usaha warung makan	1

Sumber : BUMDes Hanyukupi

Adanya usaha masyarakat ini juga menambah minat wisatawan untuk berkunjung ke BUMDes Hanyukupi. Dimana wisatawan lebih mudah dan nyaman dalam berwisata.

## 2) Efektif

Pengelola BUMDes Hanyukupi juga menerapkan efektifitas dalam mengelola BUMDes yaitu dimana masing-masing unit usaha BUMDes Hanyukupi memiliki SOP atau standar operasional. Juga pada sub unit pekerjaan ada bidangnya masing masing yang sudah sesuai standar kualitas. Namun menurut Anang Sutrisno.

“SOPnya ga tertulis dulu sempat ada tetapi karena sudah menjadi

kebiasaan jadi sudah tidak dipakai. ngalir sendiri karena ga ada sop tertulisnya. Walaupun kita masih memakai sesuai standar kita” (wawancara 29 Maret 2018)

BUMDes Hanyukupi dalam menerapkan efektifitas pengelolaan juga dengan menerapkan sistem Floating Rolling pegawai atau penempatan dan pemindahan pegawai sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan setiap unit usaha BUMDes baik itu Waterbyur, gantangan, sewa truk, gedung dan peternakan sapi memiliki karyawan dan team organisasi masing masing.

### 3) Konsisten

Kemudian dalam menjaga konsisten pengelola BUMDes Hanyukupi memberikan *reward* atau penghargaan kepada organisasi pengelola jadi selain intensif atau gaji pokok ada dana tambahan sesuai pekerjaan. Penghargaan tersebut dapat berbentuk imbalan atau penghargaan lainnya.

BUMDes Hanyukupi juga guna menjunjung konsisten selalu diadakan rapat rutin membahas terkait evaluasi, diskusi, motivasi, bonus dan lain-lain sesuai kebutuhan situasi keadaan BUMDes. Sehingga dapat menjaga keberlangsungan karyawan. Pada pelaksanaannya BUMDes juga membuat sebuah arisan antar pengurus dan pegawai yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Namun menurut Anang Sutrisno

“adanya media sosial menjadikan pengurus dan organisasi pengelola tidak selalu ketemu, enak dari jauh kalo ada apa tinggal whatsapp

atau sms lebih mudah. Walaupun kalau ada masalah pasti selau ada ketemu pengurus lain” ( wawancara 29 Maret 2018)

b. Pengorganisasian BUMDes

Pengorganisasian BUMDes Hanyukupi tidak terlepas dari Desa Ponjong dimana BUMDes merupakan usaha Desa dalam memajukan kesejahteraan. Pengorganisasian BUMDes tersusun dari 19 orang pengurus mulai dari penanggungjawab, penasihat sampai organisasi penyelenggara.

BUMDes Hanyukupi memiliki Struktur

Penasihat	: Arif Al Fauzi
Pengawas	: Drs. Supriyono
	: Supanto
Ketua	: Drs. H. Mudjiyo, M.Si
Wakil Ketua	: Budiman Setyonugraha, SP
Sekretaris	: Drs Supriyono
Anggota	: Tri Hesti Budiyan
Direktur Utama	: Anang Sutrisno, ST
Wakil Direktur Keuangan	: Nurudin Jauhari, ST
Wakil Direktur HRD	: Ahmad Sunardi
Kepala Unit Waterbyur	: Arif Nurdiyanto, S. Or.
Kepala Unit Enterprises	: Arif Nurdiyanto, S. Or
Kepala Unit Mobil	: Nurudin Jauhari, ST

Koordinator OP : Mahfud Isa

Walaupun beberapa posisi ada rangkap jabatan namun dalam pelaksanaannya tetap efektif sehingga semuanya dapat berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing masing.

BUMDes Hanyukupi pada tahun 2017 memiliki tiga unit usaha masing masing unit usaha memiliki struktur dan pengorganisasiannya sendiri. Hal tersebut dikarenakan unit usaha harus dikelola sendiri supaya lebih terfokus. Ketiga unit usaha tersebut adalah :

1) Water Byur

Water Byur memiliki 6 struktur kerja dan 9 orang karyawan yaitu Penanggungjawab 1, koordinator Organisasi pengelola 1, penjaga malam 1, kebersihan 3, Perawat kolam 1, parkir 1 dan tiketing 1 orang.

2) Gantangan

Unit usaha gantangan memiliki pengorganisasian yang lebih sedikit dimana hanya ada penanggungjawab 1, sekretaris 1, keuangan 1 dan parkir 1 orang.

3) Jasa Persewaan Truk

Unit usaha ini juga memiliki pengorganisasian sedikit yaitu hanya ada penanggungjawab sekaligus supir 1 orang.

c. Ketenagakerjaan

Proses ketenaga kerjaan BUMDes Hanyukupi pada awalnya menggunakan sistem penunjukan yaitu hanya siapa yang mau. Tetapi dalam

pelaksanaannya walaupun ditunjuk tetap tidak ada yang mau mengisi jabatan atau bekerja di BUMDes. Menurut Anang Sutrisno bahwa

“karena BUMDes belum ada uangnya jadi tidak mau berekerja di BUMDes malah beranggapan bahwa BUMDes tidak akan berjalan” (wawancara 29 Februari 2018)

Kemudian seiring berjalan dan semakin pesatnya pertumbuhan BUMDes sistem rekrutmen dilakukan melalui team atau orang diluar BUMDes dalam kata lain dipihak ketigakan dalam artian BUMDes hanya memberi spesifikasi dan kualifikasi tentang calon dan jabatan yang diperlukan.

Proses rekrutmen diserahkan kepada BPD, Perangkat Desa dan Kepala Desa. hal ini dilakukan guna menjaga netralitas dalam tubuh BUMDes sendiri sehingga dapat berjalan seuai prinsip pengelolaan BUMDes.

d. Peraturan Perundangan

Sejak berdirinya pada tahun 2010 BUMDes Hanyukupi sudah mendapat *legal standing* yaitu Peraturan Desa Ponjong Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. selain itu Kabupaten Gunungkidul juga membuat sebuah Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang

Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. yang sebelumnya sudah dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dari peraturan berikut Peraturan Desa Ponjong Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. menjadi hal mendasar karena segala sesuatu terkait BUMDes dikontrol dan mengikuti arah dari Desa.

### **3. Evaluasi Tahap Pasca Pelaksanaan**

#### **a. Hasil Pengelolaan BUMDes.**

Hasil pengelolaan dari suatu program adalah berjalan dan terukurnya capaian suatu program sehingga dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini BUMDes Hanyukupi menyasar hasil pengelolaan kedalam tiga objek yaitu:

##### **1) Terhadap Desa**

Tidak dipungkiri adanya sebuah inovaasi baru akan memberi dampak terhadap segala lini masyarakat. Pembentukan badan usaha milik Desa Desa Ponjong sudah pasti memberikan perubahan yang signifikan baik itu dari segi kebijakan lingkungan, ekonomi dan lain lain.

Pengoptimalisasian aset Desa juga memeberikan dampak terhadap desa dimana secara fisik dari segala hasil yang didapat semua aset BUMDes adalah aset Desa. Dalam hal ini BUMDes

memilik beberapa aset yaitu

- a) Kolam Sumber Ponjong yang dijadikan unit usaha Waterbyur
- b) Tanah Kas Desa dibelakang Desa dibangun untuk gazebo dan tempat tiket.
- c) Tanah di samping gazebo digunakan untuk lahan parkir.
- d) Mobil Truck Mistsubishi elf dari dinas Kominfo Gunungkidul yang digunakan untuk unit sewa truk
- e) Lahan dan Peternakan bantuan dari Saemaul Undong Foundation di dusun Serut.
- f) Gedung Serbaguna dan kantor BUMDes di samping lahan parkir bantuan dari Saemaul Undong Foundation.

Kemudian hadirnya Badan Usaha Milik Desa memberi perubahan dimana banyaknya wisatawan yang datang ke Desa Ponjong. Menurut data BUMDes Hanyukupi pada Tahun 2017.

Tabel 3.3 Data Pengunjung BUMDes Hanyukupi

No	Unit Usaha	Pengunjung
1	Unit Waterbyur	4870
2	Unit Gantangan	Tidak terdata

Sumber : BUMDes Hanyukupi

Secara langsung maupun tidak langsung adanya pengunjung BUMDes akan memberi dampak yang sangat signifikan. Secara ekonomi usaha masyarakat, penyedia barang kebutuhan seperti penjual sembako, makanan, minuman, bahan bakar kendaraan, oleh oleh dan soupenir sangat mendorong pendapatan masyarakat.

## 2) Pendapatan Desa

Menurut Arif Nurdianto selaku penanggungjawab Unit Usaha Waterbyur, kisaran data pengunjung BUMDes Ponjong dari unit usaha Water Byur pada tahun 2017 berkisar 50 ribu pengunjung dan jika dikali dengan tiket masuk seharga Rp 10.000 perorang maka pertahun omset BUMDes mendapat 500 juta.

Kemudian pembagian dana sisa hasil usaha atau SHU untuk Desa dari BUMDes mencapai 30%. Hal ini menjadikan secara ekonomi BUMDes sangat memberi peran dalam peningkatan ekonomi Desa Ponjong. Data dari tahun 2012 mencatat bahwa pendapatan BUMDes yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.4. Data Pendapatan SHU BUMDes

No	Tahun	Nominal
1	2012	15.581.040,00
2	2013	32.482.370,00
3	2014	63.315.680,00
4	2015	91.422.450,00
5	2016	93.008.000,00
6	2017	98.433.000,00

Sumber : Laporan pertanggungjawaban Keuangan BUMDes

Mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Maka pengalokasian SHU BUMDesa diperuntukan

kedalam beberapa hal yaitu tertuang dalam data alokasi dana Sisa hasil usaha BUMDes Hanyukupi Desa Ponjong.

Tabel 3.5. Data Alokasi SHU BUMDes Hanyukupi

No	Alokasi Sisa Hasil Usaha	Presentase
1	Penambahan Modal BUMDesa	40 %
2	Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa (APBDesa)	30 %
3	Tunjangan/Penghasilan Penasehat, Badan Pengawas dan Direksi BUMDesa	15 %
4	Peningkatan SDM Pengurus dan Pengelola Usaha	5 %
5	Dana Sosial	2,5 %
6	Dana Cadangan	7,5 %

Sumber laporan Pertanggungjawaban BUMDes 2017

Keterangan alokasi yaitu dana penambahan modal BUMDesa sebesar 40% akan dipergunakan sebagai biaya merencanakan program kerja BUMDes. Untuk alokasi dana ke Desa sebesar 30% masuk menjadi PADes dan dicantumkan dalam APBDes. Alokasi dana tunjangan atau penghasilan pengelola BUMDes terdiri dari penasehat, badan pengawas dan direksi BUMDesa sebesar 15% dikelola oleh BUMDes bersama penasehat dan badan pegawai. Untuk alokasi dana peningkatan SDM pengurus dan pengelola usaha sebesar 5% dikelola oleh BUMDes. Untuk alokasi dana sosial sebesar 2,5% direalisasikan untuk bantuan kepada warga miskin di Desa Ponjong dengan penunjukan diserahkan kepada pemerintah dan alokasi dana cadangan sebesar 7,5% dipergunakan untuk penyusunan laporan

pertanggungjawaban dan pelaksanaan musyawarah desa atau LPJ BUMDes.

Kemudian dalam pelaksanaannya dana SHU didapat dari unit unit usaha, dimana SHU ini di dapat setelah mengurangi kebutuhan operasional sehingga didapat pendapatan bersih. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban BUMDes. Penerimaan dan penggunaan dana sesuai dengan masing masing unit usaha yaitu sebagai berikut

a) Unit water byur

Hasil penerimaan dan pengeluaran dana unit usaha Waterbyur pada tahun 2017.

Tabel 3.6 Pendapatan Waterbyur BUMDes Hanyukupi

1	Januari	Rp 72.254.000
2	Februari	Rp 21.021.000
3	Maret	Rp 24.526.000
4	April	Rp 36.208.000
5	Mei	Rp 44.039.000
6	Juni	Rp 77.904.000
7	Juli	Rp 55.425.000
8	Agustus	Rp 15.479.000
9	September	Rp 25.269.000
10	Oktober	Rp 27.040.000
11	November	Rp 22.061.000
12	Desember	Rp 60.778.000
	Jumlah pendapatan	Rp 481.999.000

Sumber LPJ BUMDes Hanyukupi 2017

Data tabel diatas menjelaskan mengenai pendapatan unit usaha Waterbyur dimana pada hasil tersebut ada naik turunnya pendapatan unit usaha Waterbyur pada setiap bulannya. Kemudian pendapatan unit usaha Waterbyur ini didapat dari

pemasukan tiket dan sewa ban untuk berenang. Setiap pengunjung yang ingin berenang di Waterbyur dikenai tiket sebesar Rp 10.000.

Tabel 3.7 Data Biaya Pengeluaran Waterbyur BUMDes Hanukupi

1	Gaji & Honor Karyawan	Rp 175.575.500
2	Biaya Listrik	Rp 23.004.000
3	Biaya Obat Air	Rp 55.050.000
4	Biaya Makan Minum	Rp 45.006.800
5	Biaya Perawatan Kolam	Rp 22.135.000
6	Biaya Sampah Kebersihan	Rp 1.200.000
7	Baiaya Pengembangan	Rp 15.023,900
8	Biaya Dana Sosial	Rp 22.605.000
9	Biaya Administrasi	Rp 16.977.800
10	Biaya Pajak	Rp 6.500.000
11	Biaya Bagi Hasil Ban	Rp 9.184.000
	Jumlah Biaya	Rp 392.266.000

Sumber LPJ BUMDes Hanyukupi 2017

Data pengeluaran Unit Usaha Waterbyur sebagian besar digunakan untuk gaji dan honor karyawan selama satu tahun.. Selanjutnya digunakan sebagai biaya perawatan dan pemeliharaan fasilitas unit usaha Waterbyur dan juga sebagaian dikembalikan ke masyarakat melalui dana sosial.

Tabel 3.8 Data Keuntungan Warerbyur BUMDes Hanyukupi

1	Pendapatan	Rp 481.999.000
2	Biaya-biaya	Rp 392. 266.000
	Keuntungan	89.733.000

Sumber : Data keuntungan Waterbyur BUMDes Hanyukupi 2017

Sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa unit usaha Waterbyur memberikan keuntungan besar untuk BUMDes Hanyukupi, keuntungan bersih pada tahun 2017 unit usaha

Waterbyur mendapat Rp 89.733.000.

b) Unit Usaha Jasa Persewaan Truk

Unit jasa persewaan truk pada tahun 2017 diperoleh

Tabel 3.9 keuntungan Unit Usaha Jasa persewaan Truk

1	Pemasukan	Rp 3.070.500
2	Pengeluaran	Rp 1.860.000
	Keuntungan	Rp 1.210.500

Sumber : data Keuntungan Jasa Sewa Truk

Dari keuntungan tersebut diambil untuk cadangan biaya operasional truk sebesar Rp 510.000 sedangkan sisanya Rp 700.000 dimasukkan kesalam SHU BUMDes Hanyukupi 2017.

c) Unit Usaha Gantangan Burung

Tabel 3.10 keuntungan Unit Usaha Gantangan Burung

1	Latber	Rp 97.261.000
2	Latpres	Rp 90.230.000
	Total	Rp 187.491.000

Sumber LPJ BUMDes Hanyukupi 2017

Data diatas menjelaskan pendapatan atau keuntungan unit usaha Gantangan Burung yang didapat dari latber atau latihan bersama yang rutin dilaksanakan setiap satu minggu sekali dengan biaya Rp 10.000-15.000. kemudian latber spesial dilaksanakan setiap satu bulan sekali dengan biaya Rp 20.000-30.000. dan latpres atau latihan prestasi yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali dengan biaya Rp 30.000-50.000. Unit usaha Gantangan Burung memiliki 70 gantang.

Tabel 3.11 Pengeluaran Unit Usaha Gantangan Burung

1	Hadiah	Rp 109.375.000
2	ATK dan Tropi	Rp 15.637.100
3	Honor Juri	Rp 26.775.000
4	Honor Panitia	Rp 18.590.000
5	Makan Minum	Rp 5.201.500
	Total	Rp 175.578.600

Sumber : LPJ BUMDes Hanyukupi 2017

Dari data diatas menjelaskan pengeluaran unit usaha sebagian besar digunakan untuk hadiah dimana hadiah sendiri disesuaikan dengan kelas burung yang diikuti sertakan. Kemudian honor juri dan perlengkapan unit usaha.

Tabel 3.12 Keuntungan Gantangan

1	Total Pemasukan	Rp 187.491.000
2	Total Pengeluaran	Rp 175.578.600
	Jumlah SHU 2017	Rp 11.912.400

Sumber : data LPJ BUMDes Hanyukupi 2017

Sisa hasil usaha dari Gantangan burung tidak langsung dimasukkan kedalam SHU BUMDes tetapi langsung digunakan untuk biaya pengembangan usaha. Adapun rincian pengembangan usaha dari gantangan burung tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Pengeluaran Setelah SHU Gantangan

1	Pembelian Seragam Juri	Rp 1.600.000
2	Pembelian Kursi	Rp 1.000.000
3	Pengembangan Gantangan	Rp 7.217.000
4	Pembuatan Papan Nilai	Rp 1.828.000
5	Stempel nama/kelas Burung	Rp 400.000
	Jumlah	Rp 12.045.000

Sumber : Data LPJ BUMDes Hanyukupi 2017

Sampai saat ini posisi dana dalam keadaan minus Rp 132.600 angka tersebut diperoleh dari perolehan sisa hasil usaha lomba burung tahun 2017 dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya pengembangan usaha.

d) Unit Usaha Sewa Gazebo dan Pemeliharaan Ikan

unit usaha sewa gazebo dan pemeliharaan ikan tahun 2017 dengan hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14 keuntungan Sewa Gazebo

1	Pemsukan	Rp 8.000.000
2	Pengeluaran	Rp 0
	Keuntungan	Rp 8.000.000

Sumber Data LPJ BUMDes Hanyukupi 2017

Pendapatan Rp 8.000.000 tersebut diperoleh dari sewa gazebo selama 1 tahun dari rumah makan Waterbyur sebesar Rp 3.000.000 dan pendapatam dari pengelolaan kolam budidaya ikan sumber Ponjong tahun 2017 sebesar Rp 5.000.000 . Pendapatan dari sewa Gazebo dan kolam budidaya ikan tersebut dimasukkan ke dalam SHU BUMDes Hanyukupi tahun 2017

3) Masyarakat dan Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat secara sosial dengan banyak masuknya wisatawan ke Desa Ponjong ikut mendukung perekonomian. dimana banyaknya usaha masyarakat yang bersimbiosis mutualisme dengan adanya BUMDes. Kemudian dengan banyaknya wisatawan secara

sosial mengubah gaya hidup masyarakat Poonjong dimana yang sebelumnya belum pernah dijajah dunia luar kini perlahan berbenah demi memberi pelayanan dan daya tarik Desa Ponjong.

Secara budaya dari banyaknya wisatawan juga berubah, dimana budaya masyarakat yang sebelumnya terlalu kolot dan kuno kini mulai memperlihatkan sisi moderenitas. Menurut Direktur BUMDes Hanyukupi Anang Sutrisno menjelaskan

“Desa Ponjong perlahan open dengan adanya Wistawan dari luar. Karena mereka ingin memperlihatkan yang terbaik. Intinya ya mereka belajar dan malu mas gitu gitu aja” (wawancara 29 Februari 2018)

**b. Effect dan impact Program**

Efek positif adanya program BUMDes ini secara ekonomi yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat tanpa mengurangi nilai nilai yang sudah ada sehingga sistem masyarakat yang dulu berjalan tidak terkikis oleh adanya eksternalisasi dari BUMDes.

Adanya BUMDes ini semakin menambah kekuatan karifan lokal Desa Ponjong dimana BUMDes Berjalan beriringan dengan kebiasaan masyarakat. Ada beberapa kebudayaan dan kesenian yang tumbuh di Desa Ponjong.

Tabel 3.15 Daftar kebudayaan di Desa Ponjong tahun 2017

No	Jenis kesenian	Nama Kesenian	Jumlah
1	Seni Tari	Reog	1
2	Seni Musik	Campursari	1
		Mocopat/Karawitan	1
3	Seni Kriya	Ukir	1

		Dekorasi	1
--	--	----------	---

Sumber : BPS tahun 2017

Pada tahun 2012 dalam rangka peresmian BUMDes Hanyukupi diadakan Festival Reog se Gunungkidul dimana dalam pertunjukan ini dijadikan sebagai alat promosi dan pengembangan pariwisata serta kebudayaan desa. Kesenian tersebut juga turut mendorong daya tarik wisatawan ke Desa Ponjong.

Adanya Kesenian ini menambah kuatnya prowosi BUMDes dimana sebelumnya unit usaha Waterbyur adalah tempat pemandian, irigasi dan tempat kebutuhan air masyarakat. Kini semakin beriringan dimana wistawan dengan kebudayaan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pengelolaan ini terbagi kepada tiga tahap yaitu evaluasi tahap perencanaan, evaluasi tahap pelaksanaan dan evaluasi tahap pasca pelaksanaan. Ketiga evaluasi itu akan memberikan hasil dimana sebuah program diukur sesuai tahapan. Sehingga program akan terukur sejauh mana tingkat keberhasilannya. Sehingga dapa diberikan kesimpulan bahwa pada:

Evaluasi tahap perencanaan BUMDes Hanyukupi dimulai dengan perencanaan hasil akhir dimana hasil akhir tersebut dibuat berdasarkan fasilitas atau alat untuk merencanakan, pada evaluasi tahap perencanaan BUMDes Hanyukupi memiliki perencanaan bahwa dengan adanya BUMDes ini dapat memberikan hasil yang sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian

tujuan perencanaan BUMDes Hanyukupi memiliki rencana membuat semua unit usaha ataupun potensi Desa Ponjong dapat dikelola oleh BUMDes sehingga pada akhir dapat dilihat bahwa tujuan kesejahteraan masyarakat sudah terwujud melalui ekonomi masyarakat.

Kemudian Program pendukung BUMDes terdiri dari beberapa program kerja yang diawali dengan merefitalisasi Sumber Ponjong menjadi unit usaha Waterbyur. Kemudian seiring berjalannya waktu unit usaha lain didorong dengan semangat kebutuhan masyarakat maka lahirlah unit usaha Gantangan dan sewa Truk.

Pada Evaluasi tahap Pelaksanaan peneliti mengukur efektif, efisien dan konsisten BUMDes dalam menjalankan program dimana didorong melalui sumberdaya manusia atau karyawan. Banyak kegiatan ataupun pelatihan guna mendorong semangat kerja dan memunculkan inovasi baru baik melalui kerjasama ataupun memanfaatkan potensi Desa Ponjong.

Dari segi pengorganisasian setiap unit usah memiliki peran dan struktur masing masing sehingga terpisah antara pemerintah Desa dan pengurus BUMDes. Kemudian dari segi keuangan pemerintah Desa hanya memberikan modal sehingga BUMDes diberikan otonomi dalam mengelola keuangannya.

Evaluasi tahap pasca pengelolaan hadirnya BUMDes memberikan pengaruh yang sangat signifikan dimana dari tahun 2017 mendapat SHU sebesar

200 juta rupiah, dengan adanya BUMDes secara sosial masyarakat sangat

terpengaruh karena adanya wisatawan memunculkan mindset bahwa BUMDes masyarakat Ponjong harus membuka diri.